

ABSTRACT

Child sexual abuse has the highest number of cases compared to other types of child abuse in Jambi City. The Department of Community Empowerment, Women, and Child Protection (DPMPPA) is one of the agencies established by the government to anticipate and provide protection for women and children from abuse, sexual harassment, and to safeguard their human rights. Therefore, the purpose of this study is to identify and analyze the role played by DPMPPA Jambi City in addressing child sexual abuse, based on the theory of governmental roles proposed by Blakely in Mudrajad Kuncoro, which includes the roles of coordinator, facilitator, and stimulator. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The research results show that the DPMPPA Jambi City has carried out all three roles, but not yet optimally. The coordinator role has been carried out by establishing coordination with other agencies, but regular coordination meetings among the related agencies have not yet been conducted. The facilitator role has been carried out by facilitating services such as public complaint services, legal consultations, counseling with psychologist, health referrals, safe houses, victim assistance, victim outreach and the Pita Molin protection vehicle. However, there is still a shortage of psychologists and a lack of dedicated consultation rooms. The stimulator role has been carried out by involving staff in training activities, however, the number of training sessions attended by staff remains limited. In its efforts to reduce child sexual abuse, DPMPPA Jambi City has conducted socialization and educational activities through innovative programs such as Pita Molin (Pelayanan, Informasi, Dan Konsultasi Melalui Mobil Perlindungan) and Peluk Molin (Pelayanan Kelurahan Melalui Mobil Perlindungan). However, these initiatives have not yet covered all schools and urban villages in Jambi City.

Keywords: Child Sexual Abuse, Role, Child Protection

INTISARI

Kekerasan seksual anak memiliki jumlah kasus paling tinggi dibandingkan jenis kekerasan anak lainnya di Kota Jambi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) adalah salah satu instansi yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah untuk mengantisipasi dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari penganiayaan, pelecehan seksual, dan melindungi hak asasi para perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran yang dilakukan oleh DPMPPA Kota Jambi dalam menangani kekerasan seksual anak dengan menggunakan teori peran pemerintah menurut Blakely dalam Mudrajat Kuncoro yaitu peran sebagai koordinator, Fasilitator, dan Stimulator. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPPA Kota Jambi telah melaksanakan ketiga peran tersebut namun belum maksimal. Peran koordinator dilakukan dengan menjalin koordinasi dengan instansi lain, tetapi rapat koordinasi rutin antar instansi terkait belum terlaksana. Peran fasilitator dilakukan dengan memfasilitasi layanan seperti pengaduan masyarakat, konsultasi bidang hukum, konseling dengan psikolog, rujukan kesehatan, rumah aman, pendampingan, penjangkauan korban dan mobil perlindungan Pita Molin. Namun masih kurangnya psikolog dan belum tersedianya ruangan khusus konsultasi. Peran stimulator dilakukan dengan mengikutsertakan petugas dalam kegiatan pelatihan, tetapi pelatihan yang diikuti petugas masih terbilang sedikit. Dalam upaya mengurangi kekerasan seksual anak yakni dengan melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan melalui inovasi Pita Molin (Pelayanan, Informasi, Dan Konsultasi Melalui Mobil Perlindungan) dan Peluk Molin (Pelayanan Kelurahan Melalui Mobil Perlindungan) namun kegiatan tersebut belum mencakup seluruh sekolah dan kelurahan yang ada di Kota Jambi.

Kata Kunci: Kerasan Seksual Anak, Peran, Perlindungan Anak